

**KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KAMPUNG TKI SEBAGAI  
UPAYA MENGATASI KEMISKINAN DI KABUPATEN  
WONOSOBO PRIODE 2013-2016  
PERSPEKTIF EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM**



**TESIS**

Disusun dan Diajukan kepada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri  
Purwokerto untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi (M.E)

**Moh. Abdur Rohman Wahid  
Nim. 1522601007**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2017**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA) .....	vi
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS) .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
MOTTO .....	xii
PERSEMBAHAN .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10

## **BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM**

A. Kebijakan Publik .....	11
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	11
2. Proses Kebijakan Publik.....	13
3. Implementasi Kebijakan Publik .....	15
B. Kemiskinan.....	16
1. Pengertian Kemiskinan.....	16
2. Penyebab kemiskinan .....	17
3. Dimensi dalam kemiskinan .....	19
4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan .....	25
5. Pandangan Islam terhadap Kemiskinan .....	26
C. Ekonomi Pembangunan Islam .....	28
1. Konsep Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi .....	28
2. Teori Ekonomi Pembangunan Konvensional.....	30
3. Teori Ekonomi Pembangunan Ekonomi Islam .....	32
4. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi.....	33
5. <i>Maqāsid Syarīah</i> Sebagai Indikator Pembangunan.....	40
D. Hasil Penelitian yang Relevan.....	49
E. Kerangka Berpikir .....	53

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	56
1. Tempat penelitian .....	56
2. Waktu Penelitian .....	57
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	57
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	58
1. Subjek Penelitian.....	58
2. Objek Penelitian .....	59

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian .....	59
E. Teknik Analisis Data .....	62
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO</b>	
A. Profil Letak Kabupaten Wonosobo .....	66
1. Geografi Kabupaten Wonosobo.....	66
2. Pemerintahan .....	69
3. Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo .....	72
4. Pemetaan Wilayah Dan Iklim Di Kabupaten Wonosobo ..	73
B. Kemiskinan Di Kabupaten Wonosobo .....	76
C. Pembentukan Kampung TKI sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Wonosobo .....	80
1. Kegiatan Kampung TKI .....	81
2. Keberhasilan Pembentukan Kampung TKI.....	82
3. Kelemahan Pembentukan Kampung TKI.....	82
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui kebijakan pembentukan Kampung TKI di Kabupaten Wonosobo .....	84
B. Implementasi kebijakan pembentukan Kampung TKI di Kabupaten Wonosobo.....	91
C. Kebijakan pembentukan Kampung TKI ditinjau dari perspektif ekonomi pembangunan Islam .....	98
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	108
B. Rekomendasi .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan utama yang tengah dihadapi negara-negara di dunia adalah kemiskinan. Istilah kemiskinan yang berkembang tidak dapat didefinisikan dalam satu pengertian yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai perbedaan dilihat dari aspek demografi, lokasi/ geografi, ragam budaya dan sebagainya dari beberapa ahli yang mencoba untuk mendefinisikan kemiskinan dari berbagai perspektif dan sudut pandang.<sup>1</sup> Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara berkembang, karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil.<sup>2</sup>

Sampai usia kemerdekaan NKRI ke 71, kemiskinan masih merupakan masalah krusial bagi banyak wilayah di Tanah Air. Menurut kepala BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia terpusat di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, tidak merata bagi seluruh golongan masyarakat.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Di Pulau Jawa**  
**Tahun 2013– 2016 (ribu jiwa)**

PROVINSI	2013	2014	2015	2016
DKI JAKARTA	375.7	412.79	368.67	384.3
JAWA BARAT	4382.65	4238.96	4485.65	4224.32
JAWA TENGAH	4704.87	4561.82	4505.78	4506.89
YOGYAKARTA	535.18	532.58	485.56	494.94
JAWA TIMUR	4865.82	4748.42	4775.97	4703.31
BANTEN	682.71	649.19	690.67	658.11

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

<sup>1</sup> Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, "Construction of CIBEST Model As Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective", *Journal of Al-Iqtishad*, Vol. VII No. 1, January 2015, page 88.

<sup>2</sup> M. Nur Rianto al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 226.

Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di propinsi-propinsi di Pulau Jawa. Data BPS menunjukkan propinsi Jawa Timur sebagai penyumbang terbanyak penduduk miskin Pada 2016 dengan jumlah 4703.31, disusul Jawa Tengah dengan jumlah 4506.89.<sup>3</sup> Kemiskinan merupakan issue strategis dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Hal tersebut tertuang di dalam Renstra Jawa Tengah (Perda No. 11/2008), Pergub 19 tahun 2008 tentang Akselerasi Renstra, Keputusan Gubernur No. 412.6.05/55/2008 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan juga di dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Tengah 2005-2025.<sup>4</sup>

Terkait dengan target tujuan pembangunan millenium yang harus tercapai, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih harus bekerja keras untuk dapat mencapai target tersebut, mengingat upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Dari data pada Tabel 2 terlihat bahwa dari 35 Kabupaten di Provinsi wonosobo ada 14 Kabupaten termiskin di Jawa Tengah yang menjadi prioritas mengatasi kemiskinan, Wonosobo mempunyai presentase Kabupaten termiskin di Jawa Tengah pada tahun 2016.

**Tabel 2**  
**Jumlah presentase kemiskinan Di Provinsi Jawa tengah Tahun 2016**

No	Kabupaten	Angka kemiskinan	No	Kabupaten	Angka Kemiskinan
1	Wonosobo	22,02 persen	8	Banyumas	18,44 persen
2	Kebumen	21,32 persen	9	Sragen	15,93 persen
3	Rembang	20,97 persen	10	Demak	15,72 persen
4	Brebes	20,82 persen	11	Klaten	15,60 persen
5	Purbalingga	20,53 persen	12	Purworejo	15,44 persen
6	Pemalang	19,27 persen	13	Cilacap	15,24 persen
7	Banjarnegara	18,71 persen	14	Grobogan	14,87 persen

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119> ( diakses 28 November 2016)

<sup>4</sup> Rencana Strategis BPPD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, <http://birohumas.jatengprov.go.id/sites/default/files/Renstra%20bappeda%20prov%20jateng%.pdf> ( diakses 28 November 2016)

Jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa tengah ada di Kabupaten Wonosobo, yaitu 22,02 persen, Dengan demikian Wonosobo menyandang predikat Kabupaten termiskin di Jawa Tengah pada tahun 2016.<sup>5</sup> Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 mempunyai jumlah penduduk 773.280 jiwa yang tersebar di 15 Kecamatan atau 236 desa. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada dan sulitnya menciptakan lapangan kerja pada saat sekarang ini menyebabkan tidak semua pencari kerja memperoleh penempatan kerja seperti yang diinginkan. Luar negeri masih menjadi daya tarik bagi pencari kerja di Indonesia khususnya dari Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2016 ada 2.770 penduduk laki-laki dan 4.310 penduduk perempuan yang bekerja diluar negeri. Dari data tersebut dapat menunjukkan bahwa benar adanya di Kabupaten Wonosobo masih memiliki keterbatasan dalam lapangan pekerjaan serta masih sulit menciptakan lapangan pekerjaan.<sup>6</sup>

Penanganan kemiskinan dilakukan dengan berbagai cara, menurut keunggulan masing-masing wilayah serta kreasi *stakeholder*. Kabupaten Wonosobo yang mempunyai prosentase penduduk miskin tertinggi se Jawa Tengah melakukan gebrakan dengan membentuk Kampung TKI.<sup>7</sup> Langkah ini melihat jumlah penduduknya yang merantau ke luar negeri sebagai tenaga migran cukup besar. Tenaga migran yang menyandang gelar pahlawan devisa ini terbukti mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga, yang secara otomatis meningkatkan pula ketahanan ekonomi wilayah.

Desa Tracap terpilih sebagai Kampung TKI. Desa ini diresmikan sebagai Kampung TKI pada 2012 hasil kerjasama PEMDA, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Wonosobo.<sup>8</sup> Kebijakan pembentukan Kampung TKI ini dilatarbelakangi oleh banyaknya TKI dari Wonosobo. Tidak

---

<sup>5</sup> Data diolah dari BPS diakses pada tanggal 26 November 2016 di <https://jateng.bps.go.id/>

<sup>6</sup> Wonosobo dalam angka 2015, <http://bappeda.wonosobokab.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Wsb-DA-2015.pdf> (diakses 26 november 2016).

<sup>7</sup> Kampung TKI adalah sebuah kebijakan yang mengacu pada UU no. 39 tahun 2004.

<sup>8</sup> Hazliansyah "BNP2TKI Resmikan Kampung TKI di Wonosobo" *Republika*, Jum'at, 30 November 2012, [http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/12/11/30/resmikan\\_Kampung-tki-di-wonosobo](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/12/11/30/resmikan_Kampung-tki-di-wonosobo), (diakses pada 26 november 2016).

sedikit TKI purna yang pulang dan membuat usaha yang sukses di Tanah Air dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Di desa tracap tidak hanya memberdayakan buruh migran, namun juga mengorganisasi hingga seluruh Kabupaten Wonosobo. Pada Tahun 2016 Kampung TKI mempunyai 33 kelompok yang tersebar di Kabupaten Wonosobo.<sup>9</sup>

Dengan melihat potensi ini maka terbentuklah kebijakan pembentukan Kampung TKI sebagai wadah para Calon TKI dan TKI Purna. Agar kebijakan ini mempunyai payung hukum, maka BNP2TKI merumuskan sebuah landasan hukum kemudian muncul pada *Peraturan Kepala ( PERKA) BNP2TKI tahun 2015 no 8* yang mengatur teknis pembentukan Kampung TKI. Pada pasal 1 menjelaskan bahwa Kampung TKI bisa dilaksanakan jika dalam desa/Kecamatan mempunyai jumlah 30% s/d 50% jumlah TKI purna yang mempunyai usaha. PERKA ini sebagai Pelaksana UU no. 39 tahun 2004 pasal 3 huruf a dan c tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, perlu dilakukan usaha untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan meningkatkan ekonomi TKI dan keluarga.<sup>10</sup> Hal ini di dukung oleh PERDA Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Perda ini juga mengatur kewajiban dan kewenangan pemerintah Kabupaten, sekaligus hak dan kewajiban bagi para TKI.

Program-program pembentukan Kampung TKI dalam rangka pemberdayaan TKI Purna seperti pengelolaan keuangan (pembentukan koperasi) dan pelatihan kewirausahaan (pertanian, peternakan, dll) yang diberikan Calon TKI, TKI Purna dan keluarga. Kebijakan Pembentukan Kampung TKI berupaya memaksimalkan potensi buruh migran, bukan untuk selamanya bekerja di luar negeri, melainkan bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik setelah pulang ke Kampung halaman. Selain itu juga memberi edukasi, ketrampilan yang memadahi, dan perlindungan langsung bagi buruh

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Maizidah selaku ketua umum dan pelopor terbentuknya kampung TKI, wawancara pada tanggal 27 November 2016.

<sup>10</sup> Peraturan Kepala BNP2TKI nomor 08 tahun 2015. Tentang peraturan pembentukan kampung TKI



migran yang hendak berangkat atau sudah dalam perantauan. Bisa di katakan Kampung TKI membantu semua periode kehidupan buruh migran; sebelum keberangkatan, saat dalam perantauan, dan setelah menetap di Kampung. Kaum migran terbukti mampu mengentaskan kemiskinan yang disandang oleh keluarga mereka, disamping tidak bisa disangkal, sisi buruknya pun tidak sedikit. Banyak kasus kurang sedap yang dialami oleh buruh migran. Kampung TKI ada juga untuk membantu tenaga migran yang bermasalah.<sup>11</sup>

Dengan adanya Kampung TKI atau Kampung tenaga migran yang sekarang mempunyai 33 kelompok yang masing-masing terdiri dari 20-30 anggota tersebar di Kabupaten Wonosobo.<sup>12</sup> Setiap kelompok kini mempunyai usaha sendiri diantaranya berbisnis kambing, pisang Cavendish, toko sembako dan sebagainya, secara teori dengan adanya Kampung TKI mampu mendorong perekonomian di Kabupaten Wonosobo.<sup>13</sup> Tetapi sampai tahun 2016 Kabupaten Wonosobo masih menjadi Kabupaten termiskin, maka muncul persoalan apakah kebijakan model Kampung TKI mampu mengatasi kemiskinan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Wonosobo. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena ekonomi yang selalu mengiringi proses pembangunan. Hal ini yang menjadi fokus dari strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dalam mengatasi masalah kemiskinan. Berdasarkan tabel 2 di atas, upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dalam mengatasi masalah kemiskinan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dalam mengatasi masalah kemiskinan belum berjalan secara optimal.

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya atau

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Maizidah warga Kampung TKI tanggal 27 November 2016

<sup>12</sup> Suksesnya pendirian pembentukan Kampung TKI yang sudah memiliki beberapa usaha di masing-masing kelompok ini menjadikan Kampung TKI di wonosobo sebagai proyek percontohan komunitas buruh migran di daerah Malang, Banyuwangi, Lampung dan Sukabumi, <http://bestyoungindonesia.blogspot.co.id/2015/11/maizidah-salas-pendiri-Kampung-buruh.html>

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Maizidah warga Kampung TKI tanggal 27 November 2016

meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi. Konsep ekonomi Islam mengenal sebuah paradigma yang disebut *ri'ayah*, yaitu paradigma yang menjadikan pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat sebagai *mindset* kebijakan.<sup>14</sup> Maksudnya setiap pemegang kebijakan pemerintahan dia harus menjadikan kebijakannya dalam rangka pemeliharaan urusan rakyat. Dalam konsepsi Islam, maka pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat tersebut dilakukan menurut syariah.

Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan pada pembangunan material semata, tetapi juga segi spiritual dan moral harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.<sup>15</sup> Dengan demikian, kemiskinan dalam konsep Islam tidak semata-mata persoalan materi, melainkan sampai menyentuh aspek jiwa. Ini pula yang membedakan sistem sekuler dengan sistem Islam.

Oleh karena itu, tujuan pembangunan ekonomi adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqāsid syarīah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik secara mikro maupun makro.<sup>16</sup>

Pembentukan Kampung TKI membawa konsekuensi bagi desa yang ditunjuk berupa implementasi program-program sebagai wujud dari sebuah Kampung TKI. Sebagai kebijakan yang menasar pada tenaga migran, yang notabenehnya mereka bermotifkan ekonomi, kebijakan ini merupakan salah satu langkah dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan Kampung TKI tidak selalu mengenai pemberdayaan *ekonomi an-sich*, melainkan pula menyentuh pada aspek-aspek lain seperti pendidikan dan kesehatan keluarga migran. Pembangunan pusat pendidikan

---

<sup>14</sup> Affil Ikhwan "Konsepsi Ekonomi Islam untuk Pembangunan Ekonomi Negara" *Eksyar*, Volume 01, nomor 01, 2014 hlm 36-37.

<sup>15</sup> Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam* (Malaysia: International Islamic University Press, 1990), hlm. 15.

<sup>16</sup> Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994), hlm. 35-36.

anak usia dini merupakan bentuk nyata dari kebijakan ini, selain itu juga pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Sementara aspek kesehatan ditopang oleh posyandu dan pemberdayaan ibu-ibu PKK.

Gambaran singkat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi melalui kebijakan pembentukan Kampung TKI selaras dengan konsep ekonomi pembangunan Islam, di mana pembangunan tidak melulu mengenai materi, melainkan menyentuh aspek mentalitas. Kemiskinan itu sendiri memang tidak melulu mengenai materi, sebagaimana *falah* dalam konsep Islam, tidak hanya terpenuhinya kebutuhan ekonomi melainkan juga mentalitas dan rasa sejahtera tidak hanya sekedar kecukupan materi, tetapi juga rasa kecukupan dan bahagia. Sehingga konsep ekonomi Islam menginginkan satu wujud kesejahteraan secara materi dan sekaligus imateri, bukan sejahtera secara materi belaka yang acapkali membawa kehampaan bagi kehidupan seseorang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pembentukan Kampung TKI sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Periode 2013-2016 Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam”

## **B. Fokus Penelitian**

Kajian ini memfokuskan pada kebijakan pembentukan Kampung TKI di Kabupaten Wonosobo. Kajian melingkupi latar belakang, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari langkah tersebut. Kabupaten Wonosobo 3 (tiga) tahun terakhir mempunyai predikat Kabupaten termiskin di Pulau Jawa Tengah. Hal ini menarik untuk diteliti karena dengan adanya kebijakan pembentukan kampung TKI yang sudah diresmikan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang notabnya kebijakan tersebut sebagai langkah mengatasi kemiskinan di Kabupaten Wonosobo akan tetapi Kabupaten wonosobo pada tahun 2016/2017 masih menjadi Kabupaten termiskin di Jawa Tengah.

Penanganan kemiskinan haruslah dapat memadukan tiga arah kebijakan yaitu :

1. kebijaksanaan tidak langsung untuk menciptakan kondisi makro yang mendukung penanggulangan kemiskinan.
2. kebijaksanaan langsung membantu golongan masyarakat miskin (affirmative action).
3. kebijaksanaan khusus untuk menjamin keberlangsungan (sustainability) program.

Kebijakan pembentukan kampung TKI ini sudah diimplementasikan di Kabupaten Wonosobo sejak tahun 2012, akan tetapi sampai tahun 2016/2017 Kabupaten Wonosobo masih menjadi Kabupaten Termiskin di Pulau Jawa Tengah, hal ini menjadi fokus peneliti apakah dengan adanya Kebijakan tersebut belum mempunyai dampak bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo ataukah dalam implementasinya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut tidak mengacu dengan peraturan undang-undangan yang ada, dan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan Ekonomi Pembangunan Islam yang menjadikan *Maqāsid Syariah* sebagai tujuan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Kebijakan Pembentukan Kampung TKI di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembentukan Kampung TKI di Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana Kebijakan Pembentukan Kampung TKI di Wonosobo ditinjau dari Ekonomi Pembangunan Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan melalui kebijakan Pembentukan Kampung TKI di Kabupaten Wonosobo.

2. Untuk menganalisis Implementasi kebijakan pembentukan Kampung TKI di Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk menganalisis kebijakan pembentukan kampung TKI ditinjau dari Ekonomi Pembangunan Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru khususnya mengenai konsep kemiskinan dan ekonomi Pembangunan Islam. Informasi-informasi yang disajikan di dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi penelitian lanjutan, terutama bagi ilmuwan yang tertarik mendalami konsep ekonomi pembangunan Islam. Kepada peneliti lain, dapat melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang belum dibahas secara lebih dalam dan relevan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang belum terjawab dalam penelitian ini.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Masyarakat**

Sebagai bahan evaluasi masyarakat kabupaten wonosobo khususnya masyarakat yang bergabung di kelompok Kampung TKI.

###### **b. Pemerintah**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menyumbangkan bahan kajian lebih lanjut bagi para pembuat kebijakan, khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dalam memerhatikan aspek-aspek dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menurut sudut pandang ekonomi pembangunan Islam. Dan lebih khususnya sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Wonosobo

## **F. Sistematika Pembahasan**

Bagian awal dari tesis ini memuat tentang pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, dan daftar lampiran.

Bagian isi dari tesis ini terdiri dari enam bab, di mana gambaran mengenai tiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, sebagai landasan teori yang membahas tinjauan umum terkait dengan konsep kebijakan, teori kemiskinan, dan ekonomi pembangunan Islam. Selanjutnya membahas tentang hasil penelitian yang relevan dan diakhiri kerangka berfikir.

Bab III, merupakan metode penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Bab IV, merupakan pembahasan tentang gambaran umum kabupaten Wonosobo meliputi tentang letak geografis, pemerintahan, visi misi dan kemiskinan

Bab V merupakan hasil penelitian yang berisi tentang pembahasan serta penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang selama ini ada dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis, sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan di lapangan.

Bab VI, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Pada bagian akhir, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian tesis ini, beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Peran pemerintah dalam kebijakan pembentukan kampung TKI desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo adalah besar, dari membuat regulasi yang mengatur tentang pembentukan kampung TKI, melakukan identifikasi masalah dan pemetaan potensi, meresmikan kampung TKI, hingga membuat nota kesepahaman dengan sektor-sektor terkait dan melibatkan peran pemerintah secara hirarkis dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan pembentukan kampung TKI dapat terintegrasi dalam pelaksanaannya. Implementasinya berjalan secara teritegrasi, karena melibatkan dinas ketenagakerjaan, pertanian, peternakan, industri dan perdagangan, serta dinas sektor lainnya. Wujud implementasi adalah berupa pembekalan, latihan kerja, pelatihan usaha produktif, aneka ketrampilan yang menghasilkan beberapa home industri yang dijalankan oleh para TKI purna. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai fasilitator, mediator, dan koordinator.

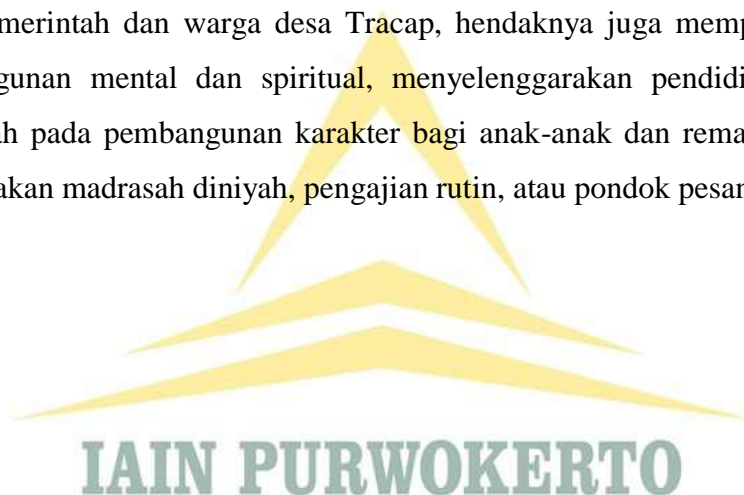
Kebijakan pembentukan kampung TKI di Kabupaten Wonosobo yang dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, agar semua masyarakatnya dapat mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak, adalah sesuai dengan ekonomi pembangunan perspektif Islam karena tidak hanya memperhatikan materi saja akan tetapi secara spiritual dan memperhatikan *Maqāsid Syarīah*



## **B. Rekomendasi**

Berdasar pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan beberapa masukan sebagai saran bagi pihak-pihak terkait, yaitu antara lain:

1. Bagi penduduk yang masuk dalam kampung TKI, dapat melakukan studi banding ke wilayah lain 108 lebih maju sehingga dapat lebih mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan perekonomian yang sudah ada.
2. Bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, dapat mengembangkan implementasi kampung TKI desa Tracap ke desa-desa lain yang setipe agar kesejahteraan penduduk bisa menyebar ke wilayah lain yang masih kurang ekonominya.
3. Bagi pemerintah dan warga desa Tracap, hendaknya juga memperhatikan pembangunan mental dan spiritual, menyelenggarakan pendidikan yang mengarah pada pembangunan karakter bagi anak-anak dan remaja, seperti mengadakan madrasah diniyah, pengajian rutin, atau pondok pesantren.





## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifudidin *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : suatu pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2006
- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2010
- Al-Syatibi, Abu Ishaq *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarīah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1.1
- Amalia, Euis. *Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Analisis Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Asmuni, *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam, Al-Mawarid*, Edisi X, 2003
- Beik, Irfan Syaui & Arsyianti, Laily Dwi, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
- Beik, Irfan Syaui and Arsyianti, Laily Dwi "Construction of CIBEST Model As Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective" , *Journal of Al-Iqtishad*,
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>
- BPS <https://jateng.bps.go.id/>
- Chapra, Umar *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid shariah*, Jedah: ITIE Book, 2008
- Chapra, Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, edisi terjemahan, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- C. Pramuwito, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Depsos RI, 1996
- Effendi, Tajuddin Noer, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta: TiaraWacana, 1995
- Fermana, Surya, *Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2009.
- Huda, Nurul dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Hazliansyah "BNP2TKI Resmikan Kampung TKI di Wonosobo" *Republika*, Jum'at, 30 November 2012, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/12/11/30/resmikan-kampung-tki-di-wonosobo>.

- Ikhwan, Afifil "Konsepsi Ekonomi Islam untuk Pembangunan Ekonomi Negara" *Eksyar*, Volume 01, nomor 01, 2014
- Lilik, *Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014.
- Khan, Muhammad Akram, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994), hlm. 35-36.
- Maulida, Devi, *Pengambilan Keputusan untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Surakarta: UMS, 2012.
- Mardimin Yohanes, *Dimesi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta : Kanisus, 1996
- Mas'oeed, Muhtar, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003
- Maran. Rafel Raga, *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta, 2001
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013
- Nugroho, Heru, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001
- Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana, 2017
- Nugroho, Riant, *kebijakan Publik di negara-negara berkembang*. Surabaya: Pustaka Belajar, 2015.
- Pasolong, H arbani, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Qutb, Muhammad, *Integritas Individu dan Sosial*, Solo : CV Pustaka Mantiq, 1991
- Rencana Strategis BPPD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, <http://birohumas.jatengprov.go.id/sites/default/files/Renstra%20bappeda%20prov%20jateng%.pdf>
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sulitayani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* Yogyakarta : gava media 2004
- Soelaeman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep ilmu social*. Bandung : Reika Aditama, 2001

- Solakhudin "Refleksi Pembangunan Perekonomian Desa guna Menghidupkan Perekonomian Bangsa" *UPBJJ-UT Semarang*
- Sadeq, Abul Hasan Muhammad *Economic Development in Islam* (Malaysia: International Islamic University Press, 1990)
- Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2000
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kopetensi dan Prakteknya*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta Bandung, 2014
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian sosial- Agama* Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Sukses Offset, 2009
- Wahab, Solichin Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM pres, 2008.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007
- Wonosobo dalam angka 2015, <http://bappeda.wonosobokab.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Wsb-DA-2015>.
- Zakaria, Junaidin, *Pengantar Teori ekonomi Makro*. Jakarta : GP Press, 2009